

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan serta menjelaskan mengenai teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Khususnya teori dan konsep terkait Strategi dalam implementasi diplomasi pertahanan Indonesia dalam bentuk kerja sama Trilateral Port Visit Indomalphi. Adapun teori yang digunakan yaitu teori Pertahanan, teori Strategi, teori Diplomasi Pertahanan, konsep *Capacity Building*, Konsep *Confidence Building Measures*, Konsep kerja sama Pertahanan serta konsep Diplomasi Maritim. Selanjutnya penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

##### **2.1.1 Teori Pertahanan**

Perkembangan lingkungan strategis menuntut adanya kajian terus menerus mengenai fenomena yang terjadi terutama terkait dengan pertahanan. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 disebutkan upaya untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman terhadap bangsa dan negara merupakan bentuk pertahanan negara. Sehingga dapat dipahami bahwa pertahanan adalah suatu kebutuhan nasional yang utama sejak suatu negara mendapat pengakuan kedaulatan.

Seiring perkembangannya, pertahanan dikembangkan menjadi suatu bidang keilmuan yang disebut dengan ilmu pertahanan. Supriyatno (2014) mendefinisikan teori Pertahanan sebagai tata kelola pemanfaatan elemen kekuatan nasional serta sumber daya yang dimiliki baik di saat kondisi damai, perang dan setelah perang dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara serta keselamatan bangsa.

Menurut Tippe (2016), ilmu pertahanan telah membawa berbagai manfaat dalam menjawab tantangan dan telah menjadi suatu cabang ilmu. Sebagai cabang ilmu, ilmu pertahanan membunyai aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aspek ontologis terkait dengan keamanan dalam cangkupan nasional untuk mendukung tujuan nasional. Keberadaan suatu negara dan kebutuhan untuk menghadapi ancaman sehingga mampu bertahan (survive). Dalam aspek epistemologi, Tippe menjelaskan bahwa sejarah Indonesia dalam mempertahankan negara sejak kemerdekaan mempunyai sifat interdisipliner.

Secara aspek aksiologi, ilmu pertahanan memberikan manfaat sejak kemerdekaan untuk melawan penjajah dan mengatasi berbagai konflik yang terjadi hingga saat ini. Ilmu pertahanan juga berguna untuk memberikan pedoman sebagai upaya mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan sosial. Dengan melihat hal tersebut, tentu ilmu pertahanan telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi Indonesia (Tippe, 2016).

Hal ini berarti bahwa ilmu pertahanan tidak hanya terkait dengan kekuatan militer pada masa perang, namun juga terkait ilmu non-militer yang digunakan saat masa damai seperti ilmu hubungan internasional, ekonomi pertahanan, sosiologi pertahanan, dan studi perdamaian. Secara metodologi, ilmu pertahanan bersifat interdisiplin dan merupakan leading theory dengan menggunakan ilmu pertahanan sebagai pendekatan utama.

Gumilar (2015, pp. 6–8) menyatakan bahwa ilmu pertahanan dapat digunakan sebagai alat untuk menjawab tantangan nasional, regional, dan global. Ilmu pertahanan membahas secara luas peran militer dan non-militer dalam menghadapi fenomena perkembangan ancaman pertahanan. Ilmu pertahanan mengkaji suatu aspek yang berhubungan dengan keamanan negara dan menjadikan perilaku negara dalam menghadapi

ancaman sebagai objek. Ilmu pertahanan juga bersifat universal dan menjadi kebutuhan institusi-institusi militer maupun nonmiliter dalam menghadapi ancaman.

Jika diteliti lebih dalam, ilmu tersebut juga memiliki peran dalam dunia internasional. Upaya untuk mewujudkan keamanan nasional tentunya memberikan kontribusi bagi setiap pengembangan kebijakan pertahanan negara, hal ini turut dirasakan oleh dunia internasional utamanya dalam membangun hubungan antarnegara yang damai, dinamis dan harmonis. Adanya interaksi yang terjadi antarnegara memposisikan ilmu pertahanan untuk terus berkontribusi demi terwujudnya suatu keamanan internasional yang juga menguntungkan posisi pertahanan sebuah negara. Dalam penelitian ini, teori pertahanan digunakan sebagai grand teori dasar penggunaan strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam kerja sama Trilateral Port Visit Indomalphi mewujudkan stabilitas keamanan terkait penanganan ancaman di Laut Sulu.

### **2.1.2 Konsep Kerja Sama Pertahanan**

Secara umum, kerjasama dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan maupun kepentingan yang dimiliki secara bersama. Kerjasama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi yang berkaitan erat dengan domain pertahanan, termasuk semua dukungan yang diperuntukkan dalam mencapai kepentingan nasional khususnya dibidang pertahanan negara (Mangindaan, 2010). Kerja sama pertahanan Indonesia diarahkan demi terciptanya kawasan yang damai serta stabil melalui usaha bersama diantara negara dan menjunjung tinggi hak serta kedaulatan masing masing negara.

Bentuk kerja sama pertahanan dikembangkan dalam membangun kepercayaan (Confidence Building Measures), pembangunan kapasitas (capacity building), ikut serta dalam menciptakan perdamaian,

pendidikan dan pelatihan, serta usaha diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan juga kemitraan strategis selaras kebijakan Pemerintah. Indonesia berperan penting sebagai mitra strategis masyarakat internasional yang dilaksanakan melalui upaya perdamaian di berbagai kawasan untuk membangun kepercayaan dunia.

Menurut Amitav Acharya dalam (L.A. Swatuk, 2013), bagi negara-negara dunia ketiga terdapat 3 pendekatan keamanan yaitu;

- a. Alliance Building, yaitu suatu pendekatan dimana para negara memilih untuk beraliansi dengan sebuah negara adikuasa. Pendekatan ini biasanya tidak memungkinkan negara dalam aliansi itu untuk melakukan aliansi dengan negara adikuasa lain diluar kawasan.
- b. Cooperative Approach yaitu pendekatan yang menekankan pada kebiasaan (habit) untuk melakukan kerja sama sebagai suatu cara menyelesaikan sengketa. Pendekatan ini berupaya untuk mempromosikan regionalisme sebagai cara mengendalikan atau mencegah konflik.
- c. Market Integrative Approach adalah suatu pendekatan keamanan yang fungsional dan menekankan pada bagaimana kerja sama ekonomi akan membawa pada kerja sama politik.

Selanjutnya menurut Supriyatno (2014), kerja sama pertahanan secara formal harus memiliki tujuan yang tertulis dalam perjanjian tersebut antara lain:

- a. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan di regional dan dunia.
- b. Mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat.
- c. Mengembangkan hubungan kerja sama antar kedua negara.

- d. Menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral diantara badan pertahanan.
- e. Meningkatkan dan memperlancar kegiatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
- f. Meningkatkan saling percaya.
- g. Mengintegrasikan persetujuan-persetujuan yang sudah ada (bila sebelumnya telah ada persetujuan).
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Dalam kerja sama pertahanan juga harus memuat prinsip-prinsip yang mencakup norma dan standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap penandatanganan dokumen kerja sama antara lain:

- a. Saling menghormati kemerdekaan masing-masing pihak.
- b. Penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara.
- c. Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing
- d. Kesetaraan
- e. Saling menguntungkan.
- f. Hidup berdampingan secara damai.
- g. Tidak saling melakukan agresi

Kerja sama pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan berbagai program, bentuknya seperti (Dyekman, 2007, p. 9):

- a. Pendidikan, pelatihan praktek bersama/multinasional
- b. Dukungan pemberantasan narkoba
- c. Kontak militer
- d. Bantuan pertahanan dalam diplomasi publik
- e. Bantuan humanitarian
- f. Pertukaran informasi/kerja sama intelejen

- g. Kerja sama pelucutan senjata internasional
- h. Dukungan keamanan seperti pendanaan militer asing, perdagangan militer asing, pendanaan operasi perdamaian.
- i. Kerja sama dalam perdamaian.

Oleh karenanya dalam kerja sama Port Visit Indomalphi diharapkan dapat mendukung peningkatan kerja sama dalam membangun rasa kepercayaan dan potensi kapasitas masing masing militer negara antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

### **2.1.3 Konsep Diplomasi Maritim**

Pada Undang-Undang No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia mendefenisikan diplomasi maritim sebagai kegiatan politik luar negeri dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan demi memenuhi kepentingan nasional yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Menurut Mièrè (2014) dalam bukunya *Maritime Diplomacy in the 21st Century*, Diplomasi Maritim mencakup kegiatan mulai dari tindakan kooperatif seperti kunjungan diplomatik, latihan, pengelolaan laut, kerjasama bilateral ataupun multilateral. Ini adalah kegiatan yang tidak lagi hanya terbatas pada penggunaan kekuatan angkatan laut saja, namun di era modern adanya kementerian lembaga selain militer yang dilibatkan dan kelompok non-negara. Diplomasi maritim dapat menjadi menekan konflik, menghapus terjadinya ancaman dan penyelesaian permasalahan dengan cara yang lebih damai.

Diplomasi maritim tidak hanya diartikan dalam pertemuan atau kerjasama dengan bentuk perundingan internasional di bidang kelautan, penentuan batas-batas wilayah di laut atau diplomasi yang dilakukan oleh angkatan laut. Diplomasi maritim Indonesia dapat dipahami bahwa dalam kegiatan politik luar negrinya selain terkait dengan berbagai aspek kemaritiman pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga yang menggunakan sarana prasarana sumber daya kelautan, peranan sipil

ataupun militer dalam memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional internasional.

Diplomasi maritim dioperasionalkan melalui 3 aspek, yaitu: aspek kedaulatan, keamanan serta kesejahteraan. Pada aspek kedaulatan, diplomasi maritim dilihat dari kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia, oleh karena itu diplomasi maritim ditujukan untuk mendukung kedaulatan bidang kemaritiman, dengan memperkuat hukum, perjanjian maritim, percepatan penyelesaian sengketa perbatasan, penguatan pertahanan serta ketahanan maritim, dan meningkatkan pembangunan wilayah maritim (BPPK Kementerian Luar Negeri RI, 2015).

Diplomasi maritim merupakan istilah yang berlaku dengan berbagai jenis aktivitas di lingkungan kemaritiman dalam hal ini gugus tugas utamanya terdapat di Angkatan Laut suatu negara berdaulat. Dimasa tenang diplomasi maritim ini dilakukan untuk mensugesti sikap dari negara lain dalam konteks hubungan serta transaksi yang terjadi pada wilayah perairan. diplomasi maritim artinya bentuk penggunaan kekuatan angkatan bahari yang terbatas dalam spektrum yang bergerak asal pelabuhan kunjungan sang kapal perang pada kebebasan navigasi latihan di bahari serta kegiatan pada sekitar pesisir pantai. tindakan ini dapat dikategorikan menjadi diplomasi koersif yang menggunakan Angkatan bahari buat mengirim frekuensi niat, dukungan serta perhatian, atau untuk memaksa perubahan dalam sikap negara lain. Hal lain jua disebutkan bahwa diplomasi maritim disamakan menggunakan diplomasi angkatan laut.

Menurut Laksamana (purnawirawan) Marsetio (2014), Diplomasi angkatan laut (Naval Diplomacy) yang dilaksanakan oleh Prajurit AL berada pada bingkai kebijakan luar negeri. Penyebaran kekuatan laut dalam hal ini kapal perang senantiasa diarahkan buat mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. Lebih lanjut, kesesuaian antara kebijakan luar negeri serta kebijakan pertahanan menjadi hal yg penting, khususnya dalam pemanfaatan Angkatan laut menjadi instrumen diplomasi negara.

Mengacu pada praktik serta pengalaman di negara-negara maju, benang merah tadi bisa tercipta karena adanya seni manajemen keamanan nasional. dengan kata lain, diplomasi Angkatan bahari dituntun sang strategi keamanan nasional.

Konsep diplomasi maritim dapat menjelaskan bahwa perubahan akan perkembangan kekuatan maritim tidak hanya pada pengembangan kekuatan militer, melainkan adanya perkembangan pada kekuatan diplomasi yang melibatkan kementerian dan lembaga lainnya yang mendukung terbentuknya kekuatan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pada penelitian ini konsep diplomasi maritim sebagai suatu strategi Diplomasi yang akan menganalisa kekuatan diplomasi maritim Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional melalui latihan gabungan Port Visit Indomalphi.

#### **2.1.4 Teori Strategi**

Pada buku rujukan pertahanan Republik Indonesia tahun 2015, strategi digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan kepentingan nasional dalam dibingkai dalam pertahanan negara. Strategi pertahanan negara dirangkum dalam 3 formula dasar, yakni: apa yang menjadi tujuan pertahanan, cara untuk mempertahankan dan sarana dan prasarana apa yang digunakan untuk mempertahankan. Pemaknaan kata strategi bukan hanya digunakan sebagai interpersasi dalam melaksanakan peperangan namun dipergunakan dalam perumusan suatu kebijakan (Hart, 1991, p. 320). seperti yg dikatakan Clausewitz (2007) strategi menghubungkan semua aspek yang terdapat serta menggunakannya secara optimal.

Sementara itu, Lykke (1997) menjelaskan strategi sebagai taktik untuk mencapai tujuan (*ends*) dengan memberdayakan power militer sebagai cara (*ways*), serta mendayagunakan militer sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik suatu negara (Mustari, 2018). Secara umum

pendefinisian strategi dirangkum dalam tiga unsur elemen, yakni Ends, means dan Ways yang saling berkaitan. Hal tersebut Secara matematis, dapat dirumuskan sebagai berikut:

dimana:

$$S = E + W + M$$

S (Strategy) = Strategi

E (Ends) = Tujuan

W (Ways) = Cara mencapai tujuan

M (Means) = Sarana dan prasarana

Dari pengertian strategi yang didefenisikan beberapa ahli dan dari Buku Putih Pertahanan tahun 2015 menjelaskan bahwa strategi adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan mencapai tujuan, melibatkan seluruh elemen kekuatan, dan adanya peranan politik untuk menerangkan tujuan dari strategi tersebut untuk melindungi segenap bangsa dan mencapai kepentingan nasional. Dengan tiga hal penting dalam merumuskan strategi yaitu tujuan apa yang di capai, cara yang digunakan dan dengan apa meraih tujuan tersebut. Perumusan strategi juga harus melihat dari peluang dan tantangan, dengan ini akan mengetahui strategi yang tepat dan untuk melakukan pengembangan serta evaluasi dari strategi tersebut. Teori strategi pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam kerja sama Trilateral Port Visit Indomalphi tahun 2017-2019.

### 2.1.5 Teori Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan merupakan suatu cara bagaimana mengelola hubungan internasional dengan kegiatan negosiasi antara dua negara atau lebih yang khusus mengkaji tentang pertahanan. Selanjutnya menurut Pedrason (2011) dikatakan bahwa diplomasi pertahanan menjangkau seluruh metode dan strategi yang digunakan

oleh negara-negara yang memungkinkan persaingan diantara mereka, tetapi telah menggunakan kegiatan jenis tertentu seperti kerja sama politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan guna meningkatkan hubungan emosional dan meningkatkan rasa saling percaya.

Diplomasi pertahanan mencangkup gagasan bahwa prajurit bersenjata serta prasarana pertahanan terkait mempunyai kemungkinan dalam memberikan kontribusi terhadap keamanan internasional, tidak hanya pada penangkalan tetapi juga diperlukan dalam pertempuran, selain itu membantu untuk mempromosikan lingkungan internasional yang lebih kooperatif serta stabil. Cottey dan Forster melihat bahwa Military Cooperation and Military assistance merupakan komponen utama dalam diplomasi pertahanan.

Di sisi lain diplomasi pertahanan menurut Andrew Cottey adalah:

*“Defence diplomacy encapsulates the idea that armed forces and related defence infrastructures have the potential to contribute to international security, not only by deterring and if necessar fighting wars, but also by helping to promote a more cooperative and stable international environment”.*

Selain itu, kegiatan diplomasi pertahanan yang dikembangkan oleh Cottey dan Forster meliputi:

- a. Kontak bilateral dan multilateral antara militer senior dan pegawai sipil di bidang pertahanan.
- b. Penunjukan atase pertahanan untuk negara lain.
- c. Perjanjian kerja sama bilateral di bidang pertahanan.
- d. Pelatihan militer dan personel sipil pertahanan dari negara lain.

- e. Pembekalan keahlian dan saran di bidang kontrol demokrasi dari angkatan bersenjata, manajemen pertahanan dan teknik militer.
- f. Kontak dan pertukaran personel dan unit militer serta kunjungan kapal.
- g. Penempatan militer atau sipil dalam kementerian pertahanan atau militer di negara mitra.
- h. Penempatan tim pelatihan.
- i. Persediaan kelengkapan militer dan bantuan material lainnya
- j. Latihan militer secara bilateral dan multilateral yang bertujuan untuk pelatihan.

Andrew Cottey juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan diplomasi pertahanan merupakan sebagai alat untuk strategi pelibatan yang bersifat dilematis. selanjutnya menjadikan proses pembentukan kebijakan pertahanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan diharapkan menjadi semakin transparan (Cottey & Foster, 2004). Menurut Rodon Pedrason (2015) Ada tiga karakteristis diplomasi pertahanan.

- a. Diplomasi pertahanan ditujukan untuk membangun kepercayaan yang pada gilirannya dapat mencegah konflik melalui penguatan persepsi kepentingan bersama dengan mantan atau calon musuh.
- b. Diplomasi pertahanan merupakan proses good governance yang mana sipil menguasai militer.
- c. Diplomasi pertahanan merupakan sarana untuk mengejar tujuan luar negeri dan keamanan yang lebih luas melalui dukungan negara lain di bidang pertahanan, bantuan ke

manusia, masalah keamanan antar negara, dan kapasitas perdamaian.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana diplomasi pertahanan merupakan suatu kegiatan diplomatik dengan penggunaan kekuatan militer dimasa damai yang dapat memperkuat kapasitas pertahanan (*capacity building*), dan juga diperuntukkan untuk membangun rasa saling percaya (*Confidence Building Measures*). Dengan demikian, rasa saling percaya dan pengertian dapat dibangun, dan area kerja sama yang lebih luas mungkin dapat dicapai. Diplomasi pertahanan dapat mendorong reformasi di bidang keamanan dan pertahanan, yang berarti kontrol sipil atas kebijakan pertahanan dan angkatan bersenjata. Dalam konteks bantuan kemanusiaan, masalah keamanan antar negara dan dukungan perdamaian, dan khususnya ASEAN, tujuan difokuskan pada kerja sama regional yang menempatkan hal-hal tersebut sebagai hal yang biasa.

#### **2.1.6 Konsep Confidence Building Measure (CBM)**

Kerja sama internasional dalam bidang pertahanan atau diplomasi pertahanan dilaksanakan untuk membangun dan memelihara *Confidence Building Measures* (CBMs). Tindakan membangun kepercayaan secara luas didefinisikan sebagai tindakan yang membahas, mencegah, atau mengatasi peningkatan permusuhan dan membangun rasa saling percaya antar negara. Bentuk kerja sama CBMs bisa dilakukan secara formal atau informal, unilateral, bilateral, maupun multilateral, militer atau politik, dan dapat dilakukan oleh state to state atau non pemerintah.

CBMs relevan dalam menangani resolusi kemandekan politik jangka panjang. Tindakan membangun kepercayaan (CBMs) dikembangkan antara aliansi militer selama perang dingin untuk menghindari serangan nuklir oleh kecelakaan dan telah melebar ke daerah

lain baik dalam aspek militer dan non militer (Glaser, 2015). CBMs dilakukan suatu negara untuk membina hubungan baik antara satu negara dengan negara lainnya guna menghindari mispersepsi antar negara maupun menurunkan ketegangan dengan cara saling terbuka satu sama lain mengenai kebijakan negara, transparansi dalam pengembangan kemampuan militer sehingga tidak ada mispersepsi dan membangun kepercayaan diantara keduanya.

Cottey dan Foster merumuskan kegiatan kegiatan diplomasi pertahanan yang dapat mendukung Confidence Building Measures (CBM) diantaranya (Cottey & Foster, 2004, p.7):

- a. Kunjungan kenegaraan
- b. Dialog dan konsultasi
- c. Saling tukar informasi strategis
- d. Pembatasan kapasitas pertahanan
- e. Deklarasi kerja sama strategis
- f. Pertukaran perwira
- g. Pendidikan militer
- h. Kesepakatan hubungan baik
- i. Latihan militer bersama secara bilateral maupun multilateral untuk tujuan pelatihan

Agar CBM dapat berjalan efektif, perlu adanya transparansi untuk membangun pola perilaku dan rasa saling menyakinkan guna meningkatkan rasa saling percaya. Oleh karena itu dalam kegiatan Port Visit Indomalphi dapat membangun rasa saling percaya sehingga mampu meningkatkan kerja sama yang telah terbangun dan berimplikasi pada penanganan masalah kejahatan di kawasan ketiga negara tersebut

### **2.1.7 Konsep Capacity Building**

Pengembangan kemampuan atau Capacity Building memiliki makna akan seluruh kemampuan individual, kelompok maupun sistem untuk menjalankan fungsinya secara efektif, efisien dan terus menerus (Millen, 2004, p. 12). Sebagai salah satu karakter dalam diplomasi pertahanan, capacity building berfungsi untuk meningkatkan pertahanan negara seperti dalam pembangunan kekuatan SDM melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan seperti halnya latihan bersama baik secara bilateral maupun multilateral for training purpose.

Mengacu pada definisi tersebut, Capacity Building mengandung tiga aspek yakni (Grindle, 1997, p.22):

- a. Pengembangan kapasitas merupakan suatu proses.
- b. Proses Capacity building harus dilaksanakan pada tiga tingkatan yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi.
- c. Proses Capacity Building tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang bersangkutan.

Ketiga aspek tersebut memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan yang berbeda-beda antara lain (p. 23):

- a. Dimensi pengembangan SDM, dengan fokus; personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan yang berupa training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen.
- b. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus; tata manaje men untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan yang berupa sistem intensif, perlengka

- pan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial.
- c. Restruktur kelembagaan, dengan fokus; kelembagaan dan sistem serta makro struktur dengan tipe kegiatan yang berupa aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi serta reformasi konstitusi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas merupakan proses yang dialami individu, kelompok, dan organisasi untuk mengolah kemampuan pada pelaksanaan fungsi serta pencapaian hasil yang diinginkan. Capacity Building bisa memberi penekanan dalam dua hal penting yaitu; pengembangan kapasitas sebagian besar seperti proses pertumbuhan serta pengembangan internal, dan juga upaya-upaya pengembangan kapasitas dapatlah berorientasi pada hasil.

Sebagai salah satu karakter dalam diplomasi pertahanan, capacity building berfungsi untuk meningkatkan pertahanan negara seperti dalam pembangunan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan seperti halnya latihan bersama baik secara bilateral maupun multilateral for training purpose. Karakter terakhir adalah diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan dengan melakukan kerja sama strategis antar negara dalam memproduksi senjata, pengembangan, pemberian lisensi, investasi dalam industri pertahanan, serta transfer teknologi. Oleh karena itu diharapkan dalam pelaksanaan Port Visit Indomalphi di Laut Sulu-Sulawesi dapat membangun serta meningkatkan kapasitas militer masing masing negara (defense diplomacy for defense capacity).

## 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum peneliti memaparkan analisis dalam penelitian. Terdapat beberapa literatur penelitian yang menggunakan bahasan tentang Strategi, Diplomasi Pertahanan, Kerja sama, dan Latihan Gabungan sebagai bahan perbandingan serta referensi. Penelitian yang dilaksanakan didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

### a. Afifah Noor Khairani

Khairani (2017) melaksanakan sebuah penelitian dengan judul *“Strategi Kerja sama di Bidang Counter Terrorism Melalui ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus dalam Meningkatkan kemampuan Penanggulangan Terorisme di Indonesia”*. Penelitian ini membahas mengenai kerja sama di bidang counter-terrorism melalui ADMM plus dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia, serta kontribusi yang dilakukan dari kerja sama penanggulangan terorisme pada peningkatan kemampuan negara. Dengan menggunakan Metode Kualitatif, penelitian ini menggunakan Teori/Konsep Diplomasi Pertahanan, Kerja sama Pertahanan, Kepentingan Nasional, dan Penanggulangan Terorisme.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa strategi yang digunakan adalah dengan cara melakukan joint training (latihan bersama) berisikan materi table top exercise dan practical exercise, memiliki tujuan untuk memberikan wawasan mengenai tantangan dan prioritas keamanan di regional, pengembangan kemampuan angkatan bersenjata milik negara dalam hal penanggulangan terorisme, dan mendukung proses penegakan hukum atau usaha lain yang dilakukan oleh institusi pemerintah. Kerjasama ini memberikan berbagai kontribusi bagi Indonesia yakni sebagai masukan terhadap hukum dan kebijakan mengenai counter terrorism, masukan pada mekanisme kerjasama lanjutan yang akan dilakukan oleh Indonesia, serta

masukannya bagi Indonesia dalam pemanfaatan alutsista untuk meningkatkan kemampuan negara dalam penanggulangan terorisme.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi kerja sama di bidang counter terrorism yang dilakukan melalui ADMM plus dapat meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia dan hal tersebut telah dirasakan oleh Indonesia dari segi peningkatan kemampuan personel maupun pemanfaatan alutsista. Dalam penelitian ini dapat disarankan bahwa Secara teoritis, program studi diplomasi pertahanan masih sangat sedikit penelitian mengenai kerjasama penanggulangan terorisme melalui ADMM plus sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan. Secara Praktis perlu adanya keterlibatan lebih aktif dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan perlu secepatnya merevisi Undang-Undang mengenai penanggulangan terorisme agar tidak terjadi tumpang tindih serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus bisa lebih proaktif dalam menyatukan semua instansi terkait. Persamaan penelitian yang dalam hal ini adalah membahas Strategi kerja sama Keamanan regional dan perbedaannya terletak pada bentuk kerja sama.

#### **b. Ihtisul Amal**

Amal (2018) melaksanakan sebuah penelitian dengan judul "*Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*". Penelitian ini membahas mengenai peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama di Laut Sulu. Dengan menggunakan Metode Kualitatif, penelitian ini menggunakan Teori/konsep Neorealisme, Kepentingan Nasional, Diplomasi dan teori Peran.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan berperan sebagai sebuah sarana bagi Indonesia sebagai negara middle power untuk mencapai kepentingan baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara internal, diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama trilateral maritime patrol Indomalphi berfungsi sebagai (1) langkah dalam mencapai kepentingan keamanan; (2) langkah untuk mencapai kepentingan ekonomi; (3) langkah untuk menjaga kedaulatan negara; dan secara eksternal, diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama ini berfungsi sebagai (4) langkah untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain untuk mengimplementasikan kerja sama lanjutan diberbagai sektor.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kerja sama trilateral maritime patrol Indomalphi merupakan salah satu implementasi diplomasi pertahanan Indonesia yang mendukung ASEAN Security Community dalam mencapai keamanan regional. Dalam penelitian ini dapat disarankan bahwa Secara Teoristis, peneliti melihat bahwa dibutuhkan penelitian lain yang menggunakan sudut pandang teori hubungan internasional yang lain sebagai teori utama, seperti teori liberalisme, konstruktivisme dan lainnya. Secara Praktis, Indonesia diharapkan untuk terus meningkatkan kapabilitas dan mendapatkan pencapaian maksimal dalam melaksanakan kerja sama melalui implementasi diplomasi pertahanan. Persamaan penelitian yang dalam hal ini adalah membahas kerja sama Indomalphi dan perbedaannya terletak pada bentuk kerja sama.

### **c. M.Wirayudha Ramadhan**

Ramadhan (2017) melaksanakan sebuah penelitian dengan judul *“Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Dalam Menghadapi Terorisme di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina”*. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi dari diplomasi pertahanan Indonesia berupa pertukaran informasi dengan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme. Dengan menggunakan Metode Kualitatif, penelitian ini menggunakan Teori/konsep Kepentingan Nasional, Kerja sama, Diplomasi

Pertahanan, Teorisme, Komunikasi, Informasi, Kebijakan, dan teori Implementasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diplomasi pertahanan memiliki peran yang sangat penting dalam kerja sama ini. Lebih lanjut implementasi kerja sama ini masih memiliki kendala dalam bidang komunikasi dan teknolog. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari diplomasi pertahanan Indonesia berupa *sharing information* dengan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme perlu ditingkatkan. Dalam penelitian ini dapat disarankan bahwa Secara Teoritis, diperlukan penelitian yang lebih lanjut tentang aspek-aspek Ekonomi dan Sosial. Secara praktis, Pemerintah perlu meningkatkan sinergitas lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam masalah terorisme. Persamaan penelitian yang dalam hal ini adalah membahas kerja sama Keamanan regional dan perbedaannya terletak pada bentuk kerja sama.

#### **d. Aris Editio Telaumbanua**

Telaumbanua (2018) melaksanakan sebuah penelitian dengan judul “Strategi Diplomasi Maritim Indonesia Pada ASEAN Maritime Forum dalam membentuk Poros maritim Dunia”. Penelitian ini membahas mengenai strategi diplomasi maritim Indonesia pada ASEAN Maritime Forum (AMF) untuk mewujudkan poros maritim dunia. Dengan menggunakan Metode Kualitatif, penelitian ini menggunakan Teori/konsep Startegi, Diplomasi, Diplomasi Pertahanan, Diplomasi maritim, Poros Maritim Dunia, serta Kepentingan Nasional.

Hasil Penelitian ini ntuk mewujudkan kebijakan poros maritim dunia, agenda dari AMF yang mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun untuk mewujudkan poros maritim dunia pada AMF perlu adanya strategi untuk lebih meningkatkan diplomasi maritim Indonesia. Strategi yang di bentuk

tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan hukum internasional. Berdasarkan analisa dengan teori strategi, konsep poros maritim dunia, konsep kepentingan nasional, strategi diplomasi maritim Indonesia pada AMF untuk mewujudkan poros maritim dunia dapat dirumuskan dengan memperkuat posisi AMF, mengembangkan tujuan AMF dan meningkatkan koordinasi kementerian / lembaga dari dalam negeri.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa diplomasi maritim Indonesia sangat berperan pada AMF, dengan Agenda AMF yang mendukung kebijakan kelautan Indonesia untuk mewujudkan poros maritim dunia dan langkah penyelesaian ancaman non-tradisional di laut. Dalam penelitian ini dapat disarankan bahwa secara teoritis yaitu, pertama, perlu pendefinisian yang lebih mendalam pada ruang lingkup diplomasi maritim. Secara Praktis diperlukan adanya koordinasi anatar lembaga terkait. Selain itu persamaan penelitian yang dalam hal ini adalah membahas kerja sama Keamanan regional dan perbedaannya terletak pada bentuk kerja sama.

#### **e. Ombun Tarera Sipahutar**

Sipahutar (2017) melaksanakan sebuah penelitian dengan judul "*Strategi diplomasi Pertahanan Indonesia melalui Multilateral Naval Exercise Komodo dalam konflik Laut Cina Selatan*". Penelitian ini membahas mengenai analisis Strategi Diplomasi pertahanan Indonesia dalam konflik perbatasan Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan Metode Kualitatif, penelitian ini menggunakan Teori/konsep Strategi, Efektivitas, Diplomasi Pertahanan, Kepentingan Nasional, serta Naval Diplomacy.

Hasil penelitian menunjukkan Multilateral Naval Exercise Komodo merupakan instrumen diplomasi yang relevan dan efektif bagi Indonesia untuk mereduksi ketegangan di Laut Cina Selatan. Lebih jauh, analisis efektivitas secara kronologis menunjukkan bahwa dalam derajat tertentu, Multilateral Naval Exercise Komodo sebagai aktivitas naval diplomacy

dapat mendukung upaya Indonesia untuk mereduksi ketegangan di Laut Cina Selatan. Untuk itu, Indonesia perlu memprioritaskan penggunaan TNIAL sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia untuk merespon dinamika konflik Laut Cina Selatan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa strategi diplomasi pertahanan Indonesia melalui *Multilateral naval exercise Komodo*, efektif sebagai suatu strategi diplomasi pertahanan Indonesia untuk mereduksi Konflik Laut Cina Selatan. Dalam penelitian ini dapat disarankan bahwa Secara Teoritis teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikembangkan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan. Secara praktis, perlu dibuat suatu rumusan strategi diplomasi pertahanan Indonesia dengan penggunaan kekuatan Angkatan Laut. Persamaan penelitian yang dalam hal ini adalah membahas kerja sama Multilateral Naval Exercise dan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian.

#### **f. Try Istiawan Adiputro**

Adiputro (2017) melaksanakan sebuah penelitian dengan judul "*Efektivitas Malacca Strait Patrol dalam Mengatasi pembajakan dan Perampokan bersenjata di Perairan Selat Malaka (2009-2014)*". Penelitian ini membahas mengenai efektivitas Patroli Selat Malaka pada setiap indikator pendekatan sumber atau masukan, pendekatan proses, dan sasaran atau Pendekatan Output. Dengan menggunakan Metode Kualitatif, penelitian ini menggunakan Teori/konsep Institusional Neoliberal. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Patroli Selat Malaka telah berhasil dan efektif dalam memerangi perompakan bersenjata di Selat Malaka berdasarkan indikator efektivitas sumber atau masukan pendekatan, pendekatan proses, dan pendekatan target atau keluaran. Persamaan penelitian yang dalam hal ini adalah membahas kerja sama Keamanan Regional dan perbedaannya terletak pada bentuk Kerja sama.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Negara melakukan kerjasama bertujuan untuk saling memenuhi kepentingan nasionalnya. Apabila suatu kerjasama masih dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan negara-negara yang terlibat tersebut kurang memaksimalkan wadah kerjasama itu sendiri. Dalam penelitian ini dapat disarankan bahwa Secara teoritis Penelitian dapat dikembangkan untuk menganalisis Aspek Strategi Diplomasi pertahanan. Secara praktis perlu dibangun sebuah bentuk kerja sama lain untuk meningkatkan nilai ekonomi antar negara. Selain itu persamaan penelitian yang dalam hal ini adalah membahas kerja sama Keamanan regional dan perbedaannya terletak pada bentuk kerja sama.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pengarang (tahun) & Judul	Rumusan Masalah, Metode & Teori/Konsep	Hasil Penelitian	Persamaan, Perbedaan, Kesimpulan & Saran
<p><b>Afifah Noor Khairani (2017)</b> Strategi Kerja sama di Bidang Counter Terrorism Melalui <i>ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus</i> Dalam Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Terorisme di Indonesia</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b> Menganalisis mengenai strategi kerja sama di bidang counter-terrorism melalui ADMM plus dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia, serta kontribusi yang dilakukan dari kerja sama penanggulangan terorisme pada peningkatan kemampuan negara</p> <p><b>Metode:</b> Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa strategi yang digunakan adalah dengan cara melakukan joint training (latihan bersama) berisikan materi table top exercise dan practical exercise, memiliki tujuan untuk memberikan wawasan mengenai tantangan dan prioritas keamanan di regional, pengembangan kemampuan angkatan bersenjata milik negara dalam hal penanggulangan terorisme, dan mendukung proses penegakan hukum atau usaha lain yang dilakukan oleh institusi pemerintah. Kerjasama ini memberikan berbagai kontribusi bagi Indonesia yakni sebagai masukan terhadap hukum dan kebijakan mengenai counter terrorism, masukan pada</p>	<p><b>Persamaan:</b> Membahas Strategi kerja sama Keamanan regional</p> <p><b>Perbedaan:</b> Bentuk kerja sama</p> <p><b>Kesimpulan:</b> strategi kerja sama di bidang counter terrorism yang dilakukan melalui ADMM plus dapat meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia, dan hal tersebut telah dirasakan oleh Indonesia dari segi peningkatan kemampuan personel maupun pemanfaatan alutsista</p> <p><b>Saran:</b> Secara teoritis, program studi diplomasi pertahanan masih sangat sedikit</p>

	<p><b>Teori/Konsep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diplomasi Pertahanan</li> <li>• Kerja sama Pertahanan</li> <li>• Kepentingan Nasional</li> <li>• Penanggulangan Terorisme</li> </ul>	<p>mekanisme kerjasama lanjutan yang akan dilakukan oleh Indonesia, serta masukan bagi Indonesia dalam pemanfaatan alutsista untuk meningkatkan kemampuan negara dalam penanggulangan terorisme.</p>	<p>penelitian mengenai kerjasama penanggulangan terorisme melalui ADMM plus sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan. Secara Praktis perlu adanya keterlibatan lebih aktif dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan perlu secepatnya merevisi Undang-Undang mengenai penanggulangan terorisme agar tidak terjadi tumpang tindih serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus bisa lebih proaktif dalam menyatukan semua instansi terkait ketika Indonesia melakukan kerjasama di bidang counter terrorism</p>
<p><b>Ihlasul Amal (2018)</b> Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b> Menganalisis peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama di Laut Sulu</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan berperan sebagai sebuah sarana bagi Indonesia sebagai negara middle power untuk mencapai kepentingan baik dari sisi internal maupun</p>	<p><b>Persamaan:</b> Membahas kerja sama Keamanan regional</p> <p><b>Perbedaan:</b> Bentuk kerja sama</p>

<p><i>Trilateral Maritime Patrol Indomalphi</i></p>	<p><b>Metode:</b> Kualitatif</p> <p><b>Teori/Konsep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neorealisme</li> <li>• Kepentingan Nasional</li> <li>• Diplomasi</li> <li>• Peran</li> </ul>	<p>eksternal. Secara internal, diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama trilateral maritime patrol Indomalphi berfungsi sebagai (1) langkah dalam mencapai kepentingan keamanan; (2) langkah untuk mencapai kepentingan ekonomi; (3) langkah untuk menjaga kedaulatan negara; dan secara eksternal, diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama ini berfungsi sebagai (4) langkah untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain untuk mengimplementasikan kerja sama lanjutan diberbagai sektor.</p>	<p><b>Kesimpulan:</b> Kerja sama <i>trilateral maritime patrol Indomalphi</i> merupakan salah satu implementasi diplomasi pertahanan Indonesia yang mendukung <i>ASEAN Security Community</i> dalam mencapai keamanan regional.</p> <p><b>Saran:</b> Secara Teoristis, peneliti melihat bahwa dibutuhkan penelitian lain yang menggunakan sudut pandang teori hubungan internasional yang lain sebagai teori utama, seperti teori liberalisme, konstruktivisme dan lainnya. Secara Praktis, Indonesia diharapkan untuk terus meningkatkan kapabilitas dan mendapatkan pencapaian maksimal dalam melaksanakan kerja sama melalui implementasi diplomasi pertahanan.</p>
---	--	--	--

<p><b>M.Wirayudha</b> <b>Ramadhan (2017)</b> Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia- Filipina Dalam Menghadapi Terorisme di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b> Pengaruh dari kerja sama pertukaran informasi Indonesia-Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme Filipina Selatan.</p> <p><b>Metode:</b> Kualitatif</p> <p><b>Teori/Konsep:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepentingan Nasional</li> <li>• Kerja sama</li> <li>• Diplomasi Pertahanan</li> <li>• Teorisme</li> <li>• Komunikasi</li> <li>• Informasi</li> <li>• Kebijakan</li> <li>• Implementasi</li> </ul>	<p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diplomasi pertahanan memiliki peran yang sangat penting dalam kerja sama ini. Lebih lanjut implementasi kerja sama ini masih memiliki kendala dalam bidang komunikasi dan teknolog</p>	<p><b>Persamaan:</b> Membahas kerja sama Keamanan regional</p> <p><b>Perbedaan:</b> Bentuk kerja sama</p> <p><b>Kesimpulan:</b> Implementasi dari diplomasi pertahanan Indonesia berupa pertukaran informasi dengan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme perlu ditingkatkan</p> <p><b>Saran:</b> Secara Teoritis, diperlukan penelitian yang lebih lanjut tentang aspek-aspek Ekonomi dan Sosial. Secara praktis, Pemerintah perlu meningkatkan sinergitas lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam masalah terorisme.</p>
--	--	--	---

<p><b>Aris EditioTelaumbanua (2018)</b></p> <p>Strategi Diplomasi Maritim Indonesia Pada ASEAN Maritime Forum Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b></p> <p>Menganalisis strategi diplomasi maritim Indonesia pada ASEAN Maritime Forum (AMF) untuk mewujudkan poros maritim dunia</p> <p><b>Metode:</b></p> <p>Kualitatif</p> <p><b>Teori/Konsep</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Startegi</li> <li>• Diplomasi</li> <li>• Diplomasi Pertahanan</li> <li>• Diplomasi maritim</li> <li>• Poros Maritim Dunia</li> <li>• Kepentingan Nasional</li> </ul>	<p>Untuk mewujudkan kebijakan poros maritim dunia, agenda dari AMF yang mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun untuk mewujudkan poros maritim dunia pada AMF perlu adanya strategi untuk lebih meningkatkan diplomasi maritim Indonesia. Strategi yang di bentuk tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan hukum internasional. Berdasarkan analisa dengan teori strategi, konsep poros maritim dunia, konsep kepentingan nasional, strategi diplomasi maritim Indonesia pada AMF untuk mewujudkan poros maritim dunia dapat dirumuskan dengan memperkuat posisi AMF, mengembangkan tujuan AMF dan meningkatkan koordinasi kementerian / lembaga dari dalam negeri.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Membahas kerja sama Keamanan regional</p> <p><b>Perbedaan:</b> Bentuk kerja sama</p> <p><b>Kesimpulan:</b> Diplomasi maritim Indonesia sangat berperan pada AMF, dengan Agenda AMF yang mendukung kebijakan kelautan Indonesia untuk mewujudkan poros maritim dunia dan langkah penyelesaian ancaman non-tradisional di laut. Kesimpulan Kedua, strategi diplomasi maritim Indonesia pada AMF adalah dengan memperkuat posisi AMF, mengembangkan tujuan AMF, dan koordinasi dari dalam negeri.</p> <p><b>Saran:</b> secara teoritis yaitu, pertama, perlu pendefinisian yang lebih mendalam pada ruang lingkup diplomasi maritim. Secara</p>
--	---	---	---

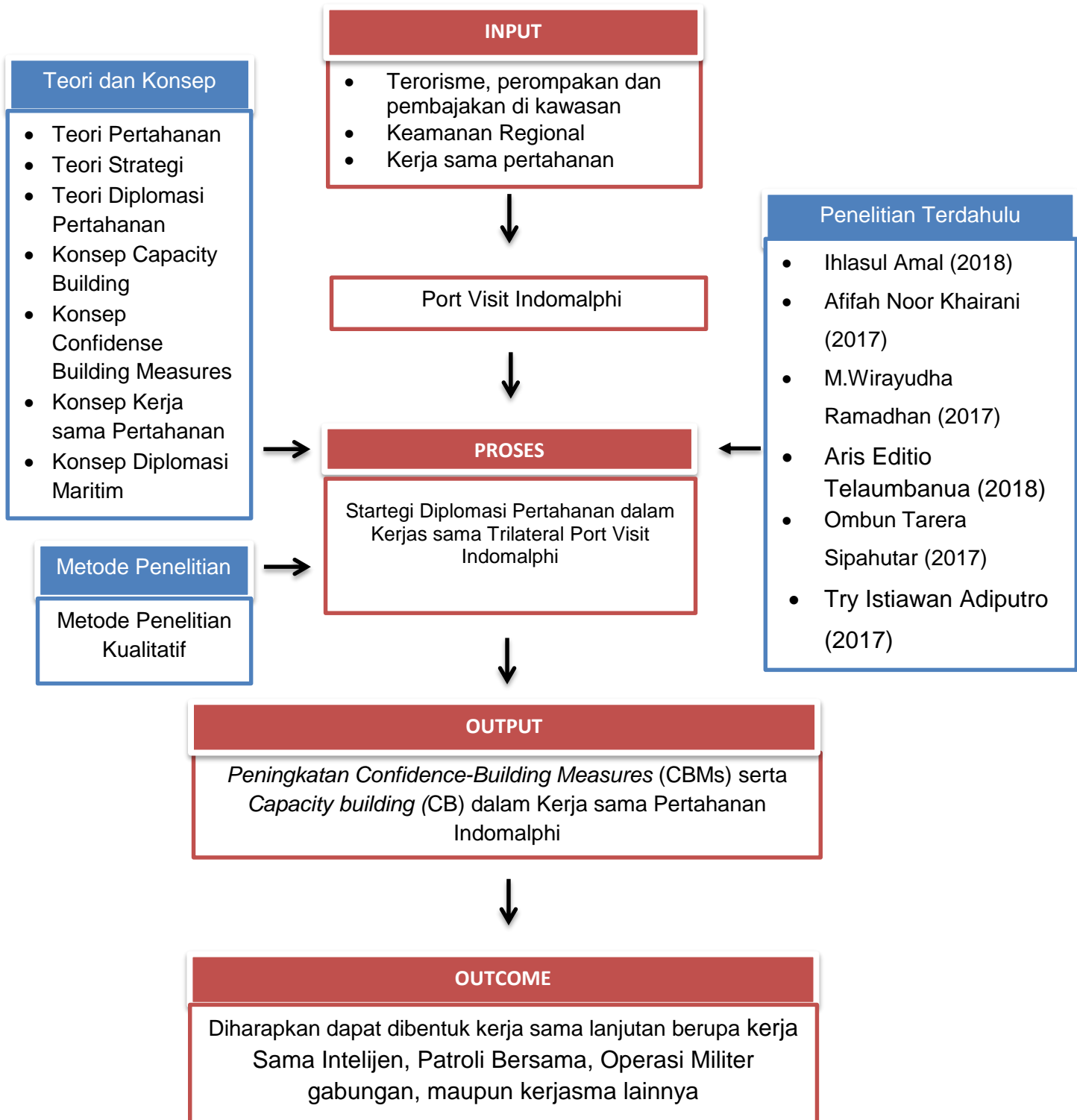
			Praktis diperlukan adanya koordinasi anatar lembaga terkait.
<p><b>Ombun Tarera Sipahutar</b> Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia melalui Multilateral Naval Exercise Komodo dalam konflik Laut Cina Selatan</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b> Menganalisis-Strategi-Diplomasi-Pertahanan-Indonesia-dalam-konflik-Laut-Cina-Selatan.</p> <p><b>Metode:</b> Kualitatif</p> <p><b>Teori/Konsep</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi</li> <li>• Efektivitas</li> <li>• Diplomasi Pertahanan</li> <li>• Kepentingan Nasional</li> <li>• Naval Diplomacy</li> </ul>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Multilateral Naval Exercise Komodo merupakan instrumen diplomasi yang relevan dan efektif bagi Indonesia untuk mereduksi ketegangan di Laut Cina Selatan. Lebih jauh, analisis efektivitas secara kronologis menunjukkan bahwa dalam derajat tertentu, Multilateral Naval Exercise Komodo sebagai aktivitas naval diplomacy dapat mendukung upaya Indonesia untuk mereduksi ketegangan di Laut Cina Selatan. Untuk itu, Indonesia perlu memprioritaskan penggunaan TNIAL sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia untuk merespon dinamika konflik Laut Cina Selatan.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Multilateral Naval Exercise</p> <p><b>Perbedaan:</b> Tujuan Penelitian</p> <p><b>Kesimpulan:</b> Strategi diplomasi pertahanan Indonesia melalui Multilateral Naval Exercise Komodo, efektif sebagai salah satu strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam mereduksi Konflik Laut Cina Selatan</p> <p><b>Saran:</b> Secara Teoritis teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikembangkan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan. Secara praktis, perlu dibuat suatu rumusan strategi diplomasi pertahanan Indonesia dengan penggunaan kekuatan Angkatan Laut</p>

<p><b>Try Istiawan</b> <b>Adiputro</b> Efektivitas Malacca Strait Patrol dalam Mengatasi Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Perairan Selat Malaka (2009-2014)</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b> Menganalisis efektivitas Patroli Selat Malaka pada setiap indikator pendekatan sumber atau masukan, pendekatan proses, dan sasaran atau Pendekatan Output</p> <p><b>Metode:</b> Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Patroli Selat Malaka telah berhasil dan efektif dalam memerangi perompakan bersenjata di Selat Malaka berdasarkan indikator efektifitas sumber atau masukan pendekatan, pendekatan proses, dan pendekatan target atau keluaran. Negara bagian telah menerapkan semua kerangka acuan (TOR) dan prosedur operasi standar (SOP) Malacca Strait Patrol (MSP) dengan baik dan benar, sehingga insiden pembajakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka bisa diminimalisir.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Membahas kerja sama Keamanan regional</p> <p><b>Perbedaan:</b> Bentuk kerja sama</p> <p><b>Kesimpulan:</b> Negara melakukan kerjasama bertujuan untuk saling memenuhi kepentingan nasionalnya. Apabila suatu kerjasama masih dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan negara-negara yang terlibat tersebut kurang memaksimalkan wadah kerjasama itu sendiri</p> <p><b>Saran:</b> Secara teoritis Penelitian dapat dikembangkan untuk menganalisis Aspek Strategi Diplomasi pertahanan. Secara praktis perlu dibangun sebuah bentuk kerja sama lain untuk meningkatkan nilai ekonomi antar negara.</p>
--	---	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Ancaman keamanan berupa aksi perompakan dan pembajakan adalah potensi ancaman bagi keamanan maritim Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim berkewajiban dalam mengamankan wilayah kedaulatannya di Laut Sulu sebagaimana yang tertuang dalam tujuan nasional Indonesia. Terjadinya kejahatan lintas negara di wilayah tersebut kerawanan di kawasan ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kerja sama pertahanan yang dibentuk ketiga negara mengedintifikasikan bahwa keamanan maritim di wilayah tersebut merupakan wilayah dengan penanganan *extra-ordinary measures*. Walaupun demikian ancaman di wilayah tersebut telah mendapat respon dengan membentuk sebuah kerja sama yang di setujui dalam kerangka *Trilateral Cooperation Agreement*. Strategi diplomasi pertahanan dalam kerja sama Port Visit Indomalphi diharapkan dapat menjadi solusi sehingga dapat meningkatkan kerja sama yang direalisasikan pada kerja sama berikutnya dalam menanggulangi ancaman transnasional seperti kerja Sama Intelijen, Patroli Bersama, Operasi Militer gabungan, maupun kerjasama lainnya.



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020.